

Dwi Riyanti, Fajar Setyaning Dwi Putra, Bakhtiar,
Munazar Umar, Ricky Santoso Muharam, Sudaryatie,
Rina Patriana Chairiyani, Muh. Sudirman

REVITALISASI PANCASILA DEMOKRASI DAN HAM



Dwi Riyanti, Fajar Setyaning Dwi Putra, Bakhtiar,
Munazar Umar, Ricky Santoso Muharam, Sudaryatie,
Rina Patriana Chairiyani, Muh. Sudirman

REVITALISASI PANCASILA DEMOKRASI DAN HAM

REVITALISASI PANCASILA DEMOKRASI DAN HAM

Tim Penulis:

**Dwi Riyanti, Fajar Setyaning Dwi Putra, Bakhtiar, Munazar Umar,
Ricky Santoso Muharam, Sudaryatie, Rina Patriana Chairiyani, Muh. Sudirman**

Desain Cover:

Helmaria Ulfa

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Proofreader:

Aas Masruroh

ISBN:

978-634-317-326-7

Cetakan Pertama:

September, 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucapkan rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “Revitalisasi Pancasila Demokrasi Dan Ham” telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang Revitalisasi Pancasila Demokrasi Dan Ham.

Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai fundamental bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa. Namun, dinamika masyarakat yang terus berkembang menghadirkan tantangan baru terhadap penghayatan dan pengamalan nilai-nilai tersebut. Perubahan teknologi informasi, perkembangan media sosial, arus globalisasi, serta munculnya berbagai persoalan sosial dan politik menuntut adanya pemahaman yang kontekstual terhadap Pancasila agar tetap relevan dalam kehidupan generasi masa kini.

Demokrasi dan hak asasi manusia juga menjadi bagian penting dalam kehidupan bernegara. Demokrasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik, sedangkan penghormatan terhadap HAM menjadi landasan dalam menjamin martabat dan kebebasan setiap manusia. Keduanya perlu berjalan seiring dengan nilai-nilai Pancasila sehingga kebebasan tidak berkembang menjadi tindakan yang mengabaikan tanggung jawab, dan kekuasaan tidak dijalankan tanpa memperhatikan hak serta kepentingan masyarakat.

Buku ini membahas gagasan revitalisasi Pancasila, demokrasi, dan HAM dengan menempatkan ketiganya sebagai unsur yang saling berkaitan. Revitalisasi tidak dimaknai sebagai penggantian nilai-nilai yang telah ada, melainkan sebagai upaya menghidupkan kembali pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai tersebut agar mampu menjawab persoalan dan tantangan kehidupan kontemporer. Dengan pendekatan tersebut, Pancasila diharapkan tidak berhenti sebagai

konsep normatif, tetapi hadir dalam perilaku masyarakat dan praktik penyelenggaraan negara.

Perkembangan demokrasi di era digital juga membawa peluang sekaligus tantangan. Ruang digital memungkinkan masyarakat memperoleh informasi, menyampaikan pendapat, dan berpartisipasi secara lebih luas. Di sisi lain, penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab, disinformasi, ujaran kebencian, polarisasi, serta berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak orang lain dapat mengancam kualitas demokrasi. Kondisi tersebut membutuhkan literasi kewarganegaraan, kesadaran hukum, etika digital, serta komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila dan HAM.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

September, 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA	
DALAM DINAMIKA GLOBAL	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka.....	4
C. Tantangan Sebagai Ideologis di Era Globalisasi dan Disrupsi Nilai	7
D. Pancasila Sebagai Etika Politik dan Moral Kebangsaan.....	10
E. Kebijakan Penguatan Ideologi Pada Masa Kepemimpinan Prabowo	14
F. Relevansi Penguatan Ideologi Terhadap Ketahanan Nasional	17
G. Rangkuman Materi	21
BAB 2 REKONTEKSTUALISASI PANCASILA	
DALAM SISTEM DEMOKRASI INDONESIA	29
A. Pendahuluan	29
B. Pancasila Sebagai Fondasi Filosofis Demokrasi Indonesia	31
C. Krisis Demokrasi Prosedural di Indonesia	32
D. Musyawarah Sebagai Prinsip Deliberatif Demokrasi Pancasila	34
E. Demokrasi Siber Dalam Perspektif Pancasila	35
F. Rangkuman Materi	38
BAB 3 SINKRONISASI NILAI PANCASILA DAN HAM DALAM KEBIJAKAN PUBLIK.....	47
A. Pendahuluan.....	47
B. Prinsip Universal HAM dan Nilai Kemanusiaan Dalam Pancasila	49
C. Ketegangan Antara Relativisme Budaya dan Universalisme HAM	52
D. Model Sinkronisasi Nilai Pancasila dan HAM Dalam Kebijakan Publik	56

E. Studi Kasus: Kebijakan HAM dan Respons Negara Terhadap Isu Sosial	59
F. Analisis Kritis Terhadap Harmonisasi Regulasi HAM	62
G. Rangkuman Materi	65
BAB 4 PENEGAKAN HUKUM DAN HAM DALAM	
TATA KELOLA PEMERINTAHAN NASIONAL.....	73
A. Pendahuluan.....	73
B. Struktur dan Fungsi Lembaga Penegakan Hukum dan HAM.....	75
C. Evaluasi Kinerja Institusi: Komnas HAM, MK, dan Kejaksaan.....	79
D. Reformasi Hukum Untuk Penegakan HAM Yang Efektif	82
E. Studi Kasus Penegakan Hukum dan Isu Ham Aktual	84
F. Integritas, Akuntabilitas, dan Etika Aparatur Negara	86
G. Rangkuman Materi	89
BAB 5 MODEL TATA KELOLA NEGARA BERBASIS	
PANCASILA DAN DEMOKRASI SUBSTANTIF.....	95
A. Pendahuluan.....	95
B. Konsep Tata Kelola Pemerintahan Dalam Perspektif Pancasila.....	96
C. Integrasi Prinsip Demokrasi, Etika, dan Hukum Dalam Kebijakan Publik.....	98
D. Penguatan Kapasitas Lembaga Publik Berbasis Nilai Pancasila.....	100
E. Model Tata Kelola Inklusif: Kolaborasi Pemerintah dan Warga.....	102
F. Implikasi Model Terhadap Ketahanan Demokrasi dan Keberlanjutan Negara	106
G. Studi Kasus: Netralitas ASN, Hak Politik, dan Risiko Diskriminasi di Daerah Otonomi Khusus.....	107
H. Penutup	110
I. Rangkuman Materi	111

BAB 6 INDONESIA INKLUSIF 2045:	
VISI DAN REFELKSI IDEOLOGIS	115
A. Pendahuluan.....	115
B. Refleksi Ideologis Terhadap Arah Pembangunan Nasional	117
C. Pancasila Sebagai Visi Moral Menuju Indonesia Emas 2045	119
D. Sinergi Demokrasi dan Ham Untuk Keadilan Sosial.....	121
E. Tantangan Global dan Ketahanan Ideologi Bangsa	124
F. Simpulan dan Implikasi Teoretis.....	126
G. Rangkuman Materi	127
BAB 7 REKOMENDASI STRATEGIS DAN	
AGENDA REFORMASI KEBIJAKAN NASIONAL	131
A. Pendahuluan.....	131
B. Rekomendasi Penguatan Ideologi dan Pendidikan Pancasila	132
C. Strategi Reformasi Regulasi dan Kelembagaan Hak Asasi Manusia	135
D. Pemberdayaan Civil Society Dalam Proses Demokrasi	139
E. Agenda Pembaruan Sistem Politik dan Hukum Nasional	143
F. Indikator Keberhasilan Tata Kelola Demokrasi	148
G. Ringkasan Materi	153
GLOSARIUM.....	161
PROFIL PENULIS	175



BAB 1

PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DALAM DINAMIKA GLOBAL

Dwi Riyanti, S.Pd., M.Pd.
Universitas Terbuka

A. PENDAHULUAN

Perkembangan global pada abad ke-21 telah menghadirkan perubahan yang sangat cepat dan multidimensi di berbagai belahan dunia. Globalisasi tidak lagi sekadar dipahami sebagai hubungan antarnegara, melainkan telah menjelma menjadi kekuatan besar yang memengaruhi hampir setiap aspek kehidupan manusia mulai dari ekonomi, politik, sosial, budaya, hingga teknologi. Berbagai penelitian menegaskan bahwa globalisasi kini menjadi aktor penting yang membentuk dinamika hubungan internasional sekaligus perilaku sosial

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, A. A. (2022). Identitas Nasional Sebagai Salah Satu Determinan Pembangunan Bangsa dan Karakter. *Jurnal Pattingalloang*, 9 (3), 259. <https://doi.org/10.26858/pattingalloang.v5i1.8520>
- Alfiah, S. M., & Anwar, L. (2024). Entitas dan Identitas Pancasila pada Perwujudan Pembelajaran Berbasis Profil Pelajar Pancasila Abad Ke-21 di Smp Negeri 1 Dau Kabupaten Malang. *Jurnal Pembelajaran Bimbingan Dan Pengelolaan Pendidikan*, 4(8), 19. <https://doi.org/10.17977/um065.v4.i8.2024.19>
- Anando, J., Herutomo, M., Halim, H., Selvia, D., & MH, H. a. S. (2024). Pengaruh Pendidikan Pancasila dalam Melawan Pengaruh Ideologi Barat. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 2(3), 1844–1855. <https://doi.org/10.62976/ierj.v2i3.815>
- Arnett, J. J. (2002). The psychology of globalization. *American Psychologist*, 57(10), 774–783. <https://doi.org/10.1037/0003-066x.57.10.774>
- Ato, N. a. J. R., Jehaman, N. B., Bria, N. J. D. L., Ndun, N. Y. Y. C., & Zega, Y. K. (2025). Relevansi Pancasila sebagai Ideologi Negara dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi: Kajian Literatur Kritis. *Educatum Jurnal Dunia Pendidikan*, 2(2), 138–152. <https://doi.org/10.62282/je.v2i2.138-152>
- Conway, L. G., III, Zubrod, A., Chan, L., McFarland, J. D., & Van De Vliert, E. (2023). Is the myth of left-wing authoritarianism itself a myth? *Frontiers in Psychology*, 13, 1041391. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1041391>
- Fahriansyah, A. R., D, A. A., Harya, B., Hosana, C., & Angkasa, G. R. (2024). Sosialisasi nilai Pancasila melalui konten kreatif bagi remaja Desa Bono sebagai implementasi Desa Penggerak Pancasila Program UNNES Giat 7. *COMSERVA Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(10), 4317–4328. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i10.1174>

- Groenendyk, E., Kimbrough, E. O., & Pickup, M. (2022). How norms shape the nature of belief systems in mass publics. *American Journal of Political Science*, 67(3), 623–638. <https://doi.org/10.1111/ajps.12717>
- Halwati, U., Alfi, I., & Arifin, J. (2018). Nasionalisme di Tengah Pluralitas dan Kebebasan Pers. *KOMUNIKA Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 12(2), 329–354. <https://doi.org/10.24090/komunika.v12i2.1684>
- Hanipah, R., & Dewi, D. A. (2022). Pentingnya Pancasila dalam Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknoogi pada Era Revolusi Industri 4.0. *Mahaguru Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 3(1), 70–78. <https://doi.org/10.33487/mgr.v3i1.3438>
- Hendra, F., & Nugroho, A. (2022). Ketahanan Ekonomi Nasional dan Tantangan Kesenjangan Sosial. Jakarta: Rajawali Pers.
- Junaedi, J., Dikrurhman, D., & Abdullah, A. (2023). Pergumulan Pemikiran Ideologi Negara Antara Islam dan Pancasila dalam NKRI. *Edunity Kajian Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(2), 232–245. <https://doi.org/10.57096/edunity.v2i2.66>
- Kaelan. (2016). Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma.
- Latif, Y. (2011). Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: Gramedia.
- Latif, Y. (2018). Wawasan Pancasila: Bintang Penuntun untuk Pembudayaan. Jakarta: Mizan.
- Nayla, M. R., Paiman, P., & Sulaeman, E. F. (2022). PPKN SUBJECTS CHANGED TO PANCASILA EDUCATION, HOW IS IT IMPLEMENTED? *Jurnal Multidisipliner Bharasa*, 1(1), 01–11. <https://doi.org/10.56691/jurnalmultidisiplinerbharasa.v1i1.240>
- Nurhayati, N., Jamaris, N., & Marsidin, N. S. (2022). Strengthening Pancasila student profiles in independent learning curriculum in elementary school. *International Journal of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*, 1(6). <https://doi.org/10.55227/ijhess.v1i6.183>

- Pravitasari, D., Septikasari, R., Yuliantoro, A. T., & Rahmawati, D. (2024). Implementasi Profil Pelajar Pancasila pada Mata Pelajaran Seni Budaya dan Prakarya di Sekolah Dasar. *JEMARI (Jurnal Edukasi Madrasah Ibtidaiyah)*, 6(1), 34–45. <https://doi.org/10.30599/jemari.v6i1.3213>
- Putri, J. A., Arasy, A., & Nelwati, S. (2023). Indonesia challenges in maintaining national identity in the era of globalisation. *Hakamain Journal of Sharia and Law Studies*, 2(1), 129–138. <https://doi.org/10.57255/hakamain.v2i1.318>
- Risdiany, H., & Dewi, D. A. (2021). Penguatan karakter bangsa sebagai implementasi Nilai-Nilai Pancasila. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 2(4), 696–711. <https://doi.org/10.36418/japendi.v2i4.140>
- Rochmat, S. (2018). Transformative Education as a Dialectic of Indonesian Culture And Modern Culture. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*. <https://doi.org/10.21831/cp.v38i3.21513>
- Ryacudu, R. (2014). *Ancaman Kontemporer dan Ketahanan Nasional*. Jakarta: Kemhan RI.
- Sahrani, N. Q. Y., Azmi, N. Z., & Sari, N. S. G. (2025). Pentingnya Menanamkan Nilai-Nilai Pancasila Di Era Digital. *Journal Central Publisher*, 1(10), 1144–1151. <https://doi.org/10.60145/jcp.v1i10.225>
- Sari, I., Adtya, N. S., Haningtyas, P., Rahmatillah, S., Manalu, R., & Afandi, A. (2023). Implementation of Pancasila values in school culture in the era of globalization. *IJRAEL International Journal of Religion Education and Law*, 2(2), 126–131. <https://doi.org/10.57235/ijrael.v2i2.664>
- Somantri, N. (2020). “Pembentukan Karakter Ideologis Generasi Muda di Era Digital,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 17(2), 121–133.
- Suryadinata, L. (2019). *National Resilience in the Global Era*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Tamara, F., Susanti, R., & Meilinda, N. (2023a). Penghayatan Nilai-Nilai Pancasila Terhadap Keberagaman untuk Mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika di Sekolah. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(07), 530–540. <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i07.475>

- Triwijaya, A. F., Fajrin, Y. A., & Wibowo, A. P. (2020). Quo Vadis: Pancasila sebagai jiwa hukum Indonesia. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 1(2), 115. <https://doi.org/10.26418/jppkn.v1i2.41083>
- Vibhisana, A. D. A., Nugroho, M. R., & Rofiulhaq, F. M. (2023). DI BAWAH KONTROL PUBLIK: Analisa kritis penerapan sistem proporsional terbuka maupun tertutup terhadap peluang penguatan kontrol publik pada Pemilu 2024. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 5(01), 24–34. <https://doi.org/10.55108/jbk.v5i01.303>
- Wahid Institute. (2023). *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama dan Intoleransi di Indonesia*. Jakarta.
- Wirayuda, R. P., Hadinata, A., Misrowati, M., Afdian, R., & Wijayanti, T. M. (2024). Pancasila as an identity that forms national character: Analysis of the philosophy of Indonesian Education. *Journal of Basic Education Research*, 5(2), 54–60. <https://doi.org/10.37251/jber.v5i2.973>



BAB 2

REKONTEKSTUALISASI PANCASILA DALAM SISTEM DEMOKRASI INDONESIA

Fajar Setyaning Dwi Putra, M.Pd.
Politeknik STMI Jakarta

A. PENDAHULUAN

Berbagai dinamika politik kontemporer memperlihatkan bahwa demokrasi Indonesia tidak sedang berada dalam kondisi yang sepenuhnya sehat. Indikator demokrasi menunjukkan gejala stagnasi bahkan penurunan kualitas dalam aspek kebebasan sipil, independensi lembaga, serta kualitas partisipasi publik. Demokrasi yang seharusnya menjadi sarana kedaulatan rakyat justru berpotensi berubah menjadi arena dominasi elite politik dan ekonomi. Dalam situasi ini, Pancasila sering dipanggil secara retorik untuk melegitimasi kekuasaan, tetapi

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Castells, M. (2012). *Networks of outrage and hope: Social movements in the internet age*. Cambridge: Polity Press.
- Crouch, C. (2004). *Post democracy*. Cambridge: Polity Press.
- Dahl, R. A. (1998). *On democracy*. New Haven: Yale University Press.
- Dryzek, J. S. (2000). *Deliberative democracy and beyond: Liberals, critics, contestations*. Oxford: Oxford University Press.
- Gutmann, A., & Thompson, D. (2004). *Why deliberative democracy*. Princeton: Princeton University Press.
- Habermas, J. (1996). *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy*. Cambridge: MIT Press.
- Habermas, J. (2006). Political communication in media society. *Communication Theory*, 16(4), 411–426.
- Hobbs, R. (2010). *Digital and media literacy: A plan of action*. Washington DC: Aspen Institute.
- Howard, P. N., & Kollanyi, B. (2016). Bots, propaganda, and computational politics. *International Journal of Communication*, 10, 4882–4890.
- Latif, Y. (2011). *Negara paripurna: Historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Magnis Suseno, F. (2016). *Etika politik: Prinsip prinsip moral dasar kenegaraan modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mietzner, M. (2014). Indonesia's democratic stagnation. *Asian Survey*, 54(2), 235–259.
- Mouffe, C. (2005). *On the political*. London: Routledge.
- Notonagoro. (1983). *Pancasila secara ilmiah populer*. Jakarta: Pantjuran Tujuh.
- Rawls, J. (1997). The idea of public reason revisited. *The University of Chicago Law Review*, 64(3), 765–807.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford: Oxford University Press.

- Sunstein, C. R. (2017). *Republic: Divided democracy in the age of social media*. Princeton: Princeton University Press.
- Tapsell, R. (2017). *Media power in Indonesia: Oligarchs, citizens and the digital revolution*. London: Rowman and Littlefield.
- Winters, J. A. (2011). *Oligarchy*. Cambridge: Cambridge University Press.



BAB 3

SINKRONISASI NILAI PANCASILA DAN HAM DALAM KEBIJAKAN PUBLIK

Dr. Bakhtiar, S.Pd., SH., M.Pd
Program Studi PPKn, Jurusan PPKn dan Hukum,
FIS-H Universitas Negeri Makassar

A. PENDAHULUAN

Sinkronisasi antara nilai-nilai Pancasila dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kebijakan publik merupakan prinsip mendasar dan poros navigasi dalam negara hukum Indonesia. Secara filosofis, Pancasila bukanlah penghalang, melainkan kerangka kontekstual yang memberikan makna lokal pada prinsip HAM universal. Sila "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" secara khusus memberikan fondasi moral yang kuat bagi penghormatan dan pemenuhan HAM,

DAFTAR PUSTAKA

- 8 Prinsip dan sifat hak asasi manusia beserta penjelasannya. (2022). HukumOnline.
- Antaranews. (2023). Komnas HAM: Pembela HAM masih berada pada situasi memprihatinkan.
<https://www.antaranews.com/berita/3860472/komnas-ham-pembela-ham-masih-berada-pada-situasi-memprihatinkan>
- BESAR. (2016). Hubungan Pancasila dan hak-hak asasi manusia di Indonesia. Business Law Binus.
- BESAR. (2016). Hubungan Pancasila dan hak-hak asasi manusia di Indonesia. Business Law Binus. <https://business-law.binus.ac.id/2016/04/29/pancasila-sebagai-landasarn-pengaturan-ham-di-indonesia/>
- Bohrium. (n.d.). Bridging the Gap Between Cultural Relativism and Universality of Human Rights: Indonesia Attitudes. <https://www.bohrium.com/paper-details/bridging-the-gap-between-cultural-relativism-and-universality-of-human-rights-indonesia-attitudes/864989937978572976-62951>
- Brodjonegoro, B. S. S., & Kumoratih, U. S. (2022). Strategi Komnas HAM dalam menyusun standar norma dan pengaturan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM di Indonesia. Jurnal HAM, 13(2), 261-278.
- ByArcadia. (2022). Human Rights: Universalism vs Cultural Relativism — A Brief Thought. <https://www.byarcadia.org/post/human-rights-universalism-vs-cultural-relativism-a-brief-thought>
- Darmawan, R. D. (2025). Hak asasi manusia dalam konteks Pancasila. Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, 2(6). <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jmia/article/view/7013>
- Daru, P. S. S., & Pratama, I. G. A. B. W. (2021). Harmonisasi nilai Pancasila dalam kerangka hak asasi manusia universal. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 3(3), 358-371.

- Fiveable Content Team. (2025, September). Universalism vs. Cultural Relativism in Human Rights. Fiveable. <https://fiveable.me/international-human-rights/unit-1/universalism-vs-cultural-relativism-human-rights/study-guide/99VumtKFNi7yMqwS>
- Freiheit.org.. (2024, 8 Maret). Bisnis dan HAM: Harmonisasi Kemakmuran dan Kemanusiaan: Sebuah Rancangan untuk Meningkatkan Bisnis dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. <https://www.freiheit.org/id/indonesia/harmonisasi-kemakmuran-dan-kemanusiaan-sebuah-rancangan-untuk-meningkatkan-bisnis-dan-hak>
- Hukumonline. (2023, 5 Oktober). Komnas HAM Susun Standar Norma dan Pengaturan Bisnis dan HAM. <https://www.hukumonline.com/berita/a/komnas-ham-susun-standar-norma-dan-pengaturan-bisnis-dan-ham-lt651f5eed9614a/>
- Hukumonline. (2024, 28 Desember). 10 Kasus yang Jadi Perhatian Komnas HAM Sepanjang 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/10-kasus-yang-jadi-perhatian-komnas-ham-sepanjang-2024-lt6770ec71becc3/>
- Hukumonline. (2025, 23 Oktober). Harmonisasi dan Kolaborasi Kunci Perbaikan Sistem Hukum Indonesia. <https://www.hukumonline.com/berita/a/harmonisasi-dan-kolaborasi-kunci-perbaikan-sistem-hukum-indonesia-lt68fa07930333e/>
- InfoPublik. (2024, 30 Desember). Komnas HAM: Konflik Bersenjata di Papua Memakan 61 Korban Jiwa Sepanjang 2024. <https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/895992/komnas-ham-konflik-bersenjata-di-papua-memakan-61-korban-jiwa-sepanjang-2024>
- Komite Menentang Penyiksaan PBB. (2001). Pertimbangan laporan yang diserahkan oleh Negara-negara Pihak menurut Pasal 19 Konvensi: Indonesia (Dokumen PBB CAT/C/47/Add.3).

- Mongabay Indonesia. (2024, 18 Maret). Mendorong Penyelesaian Konflik Agraria Berbasis HAM. <https://mongabay.co.id/2024/03/18/mendorong-penyelesaian-konflik-agraria-berbasis-ham/>
- oilu, N. I., Sihombing, A. F., Sampaleng, D., Widjaja, F. I., & Simanjuntak, F. (2022). Human rights: The convergence of the second sila of Pancasila and Hans Kung's global ethics in Indonesia. *HTS Theologiese Studies / Theological Studies*, 78(4).
- Pareira, A. H. (2025, Juni 3). Komisi XIII DPR: Setiap kebijakan harus disusun berlandaskan HAM. *ANTARA News*. <https://www.antaranews.com/berita/4876373/komisi-xiii-dpr-setiap-kebijakan-harus-disusun-berlandaskan-ham>
- Rasidi, I. A., & Farizi, M. K. A. (2025). Implementasi sila kedua Pancasila dalam perlindungan hak asasi manusia: Perspektif teori humanisme dan deklarasi HAM. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 2(02). <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/824>
- Russeng, A. (2024). Harmonizing Cultural Relativism with Universal Human Rights: Perspectives from Indonesia and the publication of Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights. *Meraja Journal*, (349). <https://merajajournal.com/index.php/mrj/article/view/349>
- Sriwidodo, J., Budisetyowati, D. A., & Taher, P. (2024). Kebijakan publik yang berbasis hak asasi manusia. *KRTHA BHAYANGKARA*, 17(2). <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/801>
- Timothy, K. (2019). *Dasar Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Penerbit Alumnus.
- U.S. Department of State. (2022). 2021 Country Reports on Human Rights Practices: Indonesia. U.S. Embassy in Indonesia. <https://id.usembassy.gov/2021-country-reports-on-human-rights-practices-indonesia>.

United Nations. (2018). Relativist Claims on Culture Do Not Absolve States from Human Rights Obligations, Third Committee Expert Says [Press Release]. UN Press.
<https://press.un.org/en/2018/gashc4241.doc.htm>



BAB 4

PENEGAKAN HUKUM DAN HAM DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN NASIONAL

Munazar Umar, S.H., M.H
STIA Abdul Azis Kataloka Ambon

A. PENDAHULUAN

Penerapan supremasi hukum dan jaminan terhadap hak-hak fundamental warga negara menjadi landasan esensial dalam konstruksi sistem governance demokratis di Indonesia. Sebagai bangsa yang menganut konsep rule of law, Indonesia telah mengonstruksi arsitektur institusional yang menyeluruh guna menegakkan prinsip legalitas dan proteksi HAM, yang termanifestasi melalui keberadaan berbagai entitas seperti institusi keamanan, penuntut umum, badan peradilan tertinggi, forum jurisdis khusus HAM, komisi independen untuk HAM, serta badan

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. F., & Khalid, K. (2025). Sinergi Kementerian Hukum dan HAM serta Komnas HAM dalam penegakan HAM di Indonesia: Tinjauan Siyāṣah Dustūriyyah. *Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial*.
<https://ojs23.uisu.ac.id/index.php/mkd/article/view/11321>
- Akbarudin, A. (2024). Pentingnya tata kelola pemerintahan desa dalam praktik pelayanan publik membangun integritas dan akuntabilitas. *Journal Politics and Government*.
<https://ejournal.lppmbinabangsa.ac.id/index.php/jpg/article/view/107>
- Auria, P., & Putra, R. A. (2024). Pentingnya penegakan hak asasi manusia dalam arus siklus negara hukum. *Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*.
<http://www.jrkhm.org/index.php/humanity/article/view/35>
- Bone, S. (2021). Reformulasi otoritas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: Telaah berbasis sistem hukum Indonesia. *Amanna Gappa*, 19(1).
<https://journal.unhas.ac.id/index.php/agil/article/view/13445>
- Erlangga, M. (2020). Kontribusi kejaksan dalam mengatasi problematika yuridis penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. *Lex Lata*, 2(1).
<https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/517/0>
- Faturohman, F., Anggreini, A., et al. (2024). Membangun sistem hukum Pancasila yang merdeka dari korupsi dan menjunjung hak asasi manusia (HAM). *Jurnal Politik, Sosial, Hukum*.
<https://ejurnalqarnain.stisnq.ac.id/index.php/ALADALAH/article/view/873>
- Firmansyah, F. (2022). *Lembaga-lembaga penegak HAM peran dan fungsinya*.
[https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/6656/1/12.%20LEMBAGA-LEMBAGA%20HAM%20\(Firmansyah\).pdf](https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/6656/1/12.%20LEMBAGA-LEMBAGA%20HAM%20(Firmansyah).pdf)

- Hidayat, R., Fatimah, S., & Alfari, M. A. (2024). Penyelesaian Komnas HAM dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*.
<https://journal.unibos.ac.id/ijlf/article/view/5427>
- Marshanda, S., Zikri, S. N., Pardede, C. S. C., et al. (2024). Analisis peranan etika dalam penerapan akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik. *Jurnal Ilmu Komunikasi*.
<http://jurnal.itcc.web.id/index.php/jiksp/article/view/1941>
- Prabowo, I. D., & Hermawati, I. (2024). Etika pemerintahan: Menjaga integritas dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. *HUMANITAS: Jurnal Humaniora, Sosial*.
<http://humanisa.my.id/index.php/hms/article/view/150>
- Priyosantoso, R. (2021). Hak asasi manusia di Indonesia: Tinjauan politik hukum era reformasi. *Jurnal Ilmu Kepolisian*.
<http://jurnalptik.id/index.php/JIK/article/view/341>
- Ramadhan, F., Nugraha, X., & Felany, P. I. (2020). Penataan ulang kewenangan penyidikan dan penuntutan dalam penegakan hukum pelanggaran HAM berat. *Veritas et Justitia*, 6(2).
<https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/3514>
- Rauf, S., Hasjad, H., & Guntur, S. (2022). Efektivitas peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam melindungi saksi tindak pidana gratifikasi. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 1(1).
<https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/view/26>
- Rizki, H. B. (2020). *Studi lembaga penegak hukum*. Universitas Lampung.
<http://repository.lppm.unila.ac.id/51961/1/studi%20Lembaga%20Penegak%20Hukum.pdf>
- Rusliandy, R. (n.d.). Dampak kebijakan transparansi terhadap integritas pejabat publik di pemerintahan daerah. *Jurnal EL-RIYASAH*.
<https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/elriyasa/article/view/33995>

- Sutrisno, S. (2020). Kebijakan sistem penegakan hukum menuju hukum berkeadilan. *Pagaruyuang Law Journal*, 4(1).
<https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/view/1833>
- Syakoer, M. (2023). Integritas yang kokoh dalam membentuk kepribadian ASN. *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)*.
<http://jmas.unbari.ac.id/index.php/jmas/article/view/1187>



BAB 5

MODEL TATA KELOLA NEGARA BERBASIS PANCASILA DAN DEMOKRASI SUBSTANTIF

Dr. Ricky Santoso Muharam, S.Pd., M.Sos.
Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta

Dra. Sudaryatie, M.Si
UPN "Veteran" Yogyakarta

A. PENDAHULUAN

Bab ini mengembangkan model tata kelola negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan gagasan demokrasi substantif, sebagai alternatif terhadap tata kelola yang selama ini bersifat prosedural dan legalistik. Argumen utama yang dikembangkan adalah bahwa tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Diamond, L., & Morlino, L. (2004). The quality of democracy: An overview. *Journal of Democracy*, 15(4), 20–31. <https://doi.org/10.1353/jod.2004.0060>
- Hadjon, P. M., Martosoewignjo, S. S., Basah, S., Manan, B., Marzuki, H. M. L., & Berge, J. B. J. M. ten. (2010). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Hamdi, M., & Day, A. (2024). Kepemimpinan etis dan tata kelola pemerintahan dalam perspektif nilai keagamaan dan Pancasila. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pemerintahan*, 8(2), 101–116.
- Haris, O. K. (2015). Good governance sebagai tolok ukur untuk mengukur kinerja pemerintahan. *Jurnal Pemerintahan*, 10(1), 1–15.
- Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). *How democracies die*. Crown Publishing.
- Mulyani, T., Natalis, A., & Handitya, B. (2021). Good governance construction in the era of digital democracy based on Pancasila value in Indonesia. *Proceedings of the International Conference and Call Paper*.
- Sandel, M. J. (2020). *The tyranny of merit: What's become of the common good?* Farrar, Straus and Giroux.
- Saputra, R., et al. (2024). Reformasi partai politik, akuntabilitas publik, dan ketahanan demokrasi Indonesia. *Jurnal Demokrasi dan Ketatanegaraan*, 6(1), 45–63.
- Wahyudin, W., Siswomiharjo, K. W., & Kaelan. (2019). Pancasila and the development of democracy in Indonesia: An axiological perspective. *Jurnal Kawistara*, 9(2). <https://doi.org/10.22146/kawistara.34854>

Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Republik Indonesia. (2001). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
- Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Pemerintah Aceh. (2014). Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292.
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023.



BAB 6

INDONESIA INKLUSIF 2045: VISI DAN REFLEKSI IDEOLOGIS

Dr. Rina Patriana Chairiyani S.S., M.Pd
Universitas Bina Nusantara

A. PENDAHULUAN

Materi “Indonesia Inklusif 2045: Visi dan Refleksi Ideologis” disusun untuk memberikan kerangka konseptual mengenai bagaimana arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 perlu ditopang oleh pemikiran ideologis yang kokoh dan berorientasi pada inklusivitas. Pembahasan setiap bab diarahkan untuk menegaskan hubungan antara visi pembangunan, nilai moral Pancasila, prinsip demokrasi dan HAM, serta ketahanan ideologi bangsa dalam menghadapi dinamika global. Secara keseluruhan, materi ini bertujuan memperkuat pemahaman

DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty.id. 2025. *27 Tahun Reformasi, Indonesia Alami Erosi Kebebasan Politik dan Hak-hak Sosial*.
<https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/27-tahun-reformasi-indonesia-alami-erosi-kebebasan-politik-dan-hak-hak-sosial/05/2025/>
- Ato, A.J.R., Jehaman, B., Bria, J.D.L., Ndun, Y.Y.C., Zega, Y.K. 2025. Relevansi Pancasila Sebagai Ideologi Negara Dalam Menghadapi Tantangan Global: Kajian Literatur Kritis. *Educatum: Jurnal Dunia Pendidikan*, 2(2). pp. 138-152.
- Bps.go.id. 2025. *Ekonomi Indonesia*.
<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/02/05/2408/ekonomi-indonesia-tahun-2024-tumbuh-5-03-persen--c-to-c---ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2024-tumbuh-5-02-persen--y-on-y---ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2024-tumbuh-0-53-persen--q-to-q--.html>
- Muc.co.id. 2025. *Melambat, Pertumbuhan Ekonomi 2024 Sebesar 5,03%*. <https://muc.co.id/id/article/melambat-pertumbuhan-ekonomi-2024-sebesar-503>
- OMBUDSMAN RI. 2019. *Potret Pelayanan Publik Di Daerah dan Kelompok Marjinal*. Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia.
- Susanto, G.A., 2025. Tinjauan Kritis Atas Berkembangnya Media Sosial dan Ancaman Terhadap Media Mainstream Menurut Manuel Castells. *Jurnal Dekonstruksi*, 11 (01), pp. 6-16.
- Tando, C.E., Hikmah, N. 2024. Isu Antara Perubahan Iklim dan Keadilan Sosial: Sebuah Kajian Literatur. *Sosiohumaniora*, 10 (2), pp. 314-337.
- Tiara, A.B., 2025. *Demokrasi yang Berkeadilan Dalam Bingkai NKRI: Mewujudkan Masyarakat yang Adil dan Makmur*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Wonggo, O.F. 2025. *Quo Vadis Keberlanjutan Erosi Nilai Demokrasi Indonesia*, <https://www.lab45.id/detail/302/quo-vadis-keberlanjutan-erosi-nilai-demokrasi-indonesia>

- Rahma, A.A. 2024. *Evaluasi Dampak Kebijakan Pemerintah Bagi Rakyat*.
<https://www.netralnews.com/kebijakan-pemerintah-bagi-rakyat-antara-harapan-dan-kekecewaan/blhQMHNnbXh3NGl2ZEprZ0treWh5dz09>
- Aspan, H. 2024. Eefektitas Akses Keadilan Bagi Masyarakat Marginal.
Jurnal Pengabdian Masyarakat Multi Displin Ilmu, 2 (1).



BAB 7

REKOMENDASI STRATEGIS DAN AGENDA REFORMASI KEBIJAKAN NASIONAL

Dr. Muh. Sudirman, S.Ag.M.Pd
Universitas Negeri Makassar

A. PENDAHULUAN

Dalam menghadapi dinamika global yang kian kompleks, Indonesia dihadapkan pada tuntutan untuk menegaskan kembali arah kebijakan nasional yang berlandaskan nilai-nilai dasar bangsa. Tantangan seperti disrupsi teknologi, krisis etika politik, dan melemahnya kohesi sosial menuntut pembaruan yang menyeluruh pada sistem ideologi, hukum, dan tata kelola pemerintahan. Dalam konteks inilah, rekomendasi strategis dan agenda reformasi kebijakan nasional menjadi penting

DAFTAR PUSTAKA

- Afiff, S. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat Sipil dalam Demokrasi Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Gagasan Negara Hukum Indonesia: Refleksi Teoretik dan Praksis*. Jakarta: Rajawali Press.
- BPIP. (2023). *Strategi Nasional Pembinaan Ideologi Pancasila 2023–2045*. Jakarta: BPIP.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Butt, S. (2020). *Corruption and Law in Indonesia*. Routledge.
- Diamond, L., & Morlino, L. (2005). *Assessing the Quality of Democracy*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: From National Systems and 'Mode 2' to a Triple Helix of university–industry–government relations. *Research Policy*, 29(2).
- Fukuyama, F. (1995). *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. Free Press.
- Hadiz, V. R., & Robison, R. (2010). *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. Routledge.
- Hikam, M. A. S. (1999). *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: LP3ES.
- INFID. (2021). *Civil Society in Indonesia: Opportunities and Challenges*. Jakarta.
- Kaelan. (2013). *Pendidikan Pancasila: Paradigma Reformasi Berbangsa dan Bernegara*. Yogyakarta: Paradigma.
- KemenPAN-RB. (2024). *Laporan Tahunan SP4N-Lapor!*. Jakarta.
- Kemkominfo. (2023). *Gerakan Nasional Literasi Digital*. Jakarta.
- Komnas HAM. (2022). *Annual Report on Human Rights Enforcement*. Jakarta.
- Komnas HAM. (2023). *Annual Report on Human Rights Conditions in Indonesia*. Jakarta.
- Komnas HAM. (2023). *Laporan Tahunan Penegakan HAM 2023*. Jakarta.
- KPK. (2023). *Integrity Assessment Tools Report*. Jakarta.

- Latif, Y. (2020). *Wawasan Pancasila: Bintang Penuntun untuk Pembudayaan*. Jakarta: Gramedia.
- Mahfud MD. (2009). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES.
- Mahfud MD. (2010). *Konstitusi dan Hukum dalam Perspektif Reformasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- OECD. (2022). *Open and Inclusive Governance: Human Rights Mechanisms for Digital Societies*. Paris.
- Pemkot Surabaya. (2023). *Inovasi Musrenbang Online dan Partisipasi Warga*. Surabaya.
- Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press.
- Reynolds, A., Reilly, B., & Ellis, A. (2008). *Electoral System Design: The New International IDEA Handbook*. Stockholm: IDEA.
- Schmidt, M. (2020). *Digital Democracy in Practice: Party Governance and Transparency*. Berlin: Springer.
- Setara Institute. (2022). *Indeks Toleransi Nasional 2022*. Jakarta.
- Supreme Court of Indonesia. (2022). *Laporan Implementasi E-Court Nasional*. Jakarta.
- UNDP. (2014). *Governance for Sustainable Development*. New York.
- UNDP. (2021). *Human Rights and Development Report: Southeast Asia*. New York.
- UNDP Indonesia. (2019). *Local Governance and Participatory Democracy Report*. Jakarta.
- UN Human Rights Council. (2020). *Best Practices in National Human Rights Institutions*. Geneva.
- Verba, S., Scholzman, K. L., & Brady, H. E. (1995). *Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics*. Harvard University Press.
- Wahyudi, A. (2024). *Digitalisasi dan Tantangan HAM di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- World Bank. (2021). *World Development Report: Governance and the Law*. Washington, DC.
- World Justice Project. (2023). *Rule of Law Index*. Washington, DC.

PROFIL PENULIS



Dwi Riyanti, S.Pd., M.Pd. lahir pada 4 Januari merupakan dosen tetap Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka Pusat. Lulusan S1 dan S2 dari Universitas Negeri Yogyakarta Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dwi juga pernah mengajar sebagai Dosen Luar Biasa di Universitas Negeri Yogyakarta dan Universitas Ahmad Dahlan. Saat

ini Dwi juga sebagai editor Unnes *Political Science Journal* dan Editor *Journal of Education and Technology*, serta sebagai reviewer Jurnal Pancasila dan Bela Negara. Penelitian yang sedang dilakukan antara lain: sebagai Ketua Tim Peneliti “Ketahanan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19 Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Bantul”, Ketua Tim Peneliti “Pengelolaan Pasar Tradisional Menggunakan Asas Kekeluargaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, Ketua Tim Peneliti “Pengembangan Klinik Bimbingan Akademik dan TAP Mahasiswa Berbasis Online”, serta sebagai anggota penelitian “Penerapan Model Tutorial Online untuk Meningkatkan Keterlibatan Aktif Mahasiswa”, “Etika Orang Jawa Dalam Menghadapi Musibah (Studi Kasus: Bencana Lahar Gunung Semeru)”, Ketua Tim “Pengembangan Video Pembelajaran Berbasis Budaya Lokal Untuk Penguatan Karakter Profil Pelajar Pancasila”, dan Ketua Tim “Model Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Sosiokultural untuk Memperkuat Karakter Kebangsaan”



Fajar Setyaning Dwi Putra, lahir di Bandung, 19 Januari 1992. Penulis merupakan akademisi dan peneliti pada bidang kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kewargaan digital, filsafat Pancasila, ilmu pendidikan sosial, dan pembelajaran. Saat ini bertugas sebagai dosen di Politeknik STMI Jakarta, Kementerian

Perindustrian Republik Indonesia. Riwayat pekerjaan penulis sebagai Wakil Dekan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Insan Cendekia Mandiri Bandung (2020-2022), Dosen Luar Biasa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Ketua Dewan Editor Jurnal Pendidikan, Pembelajaran, dan Pemberdayaan Masyarakat (JP3M) tahun 2019-2023, Reviewer Jurnal Riset dan Inovasi Pembelajaran (JRIP) dan *Reviewer of International Journal of Education, Culture and Society United State of America 2022-2023*, Fasilitator Dosen Bela Negara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia 2022, tutor online dan korektor di Universitas Terbuka. Penulis juga aktif menulis artikel di beberapa media massa diantaranya adalah penulis dalam kolom Kompas.com, Radar Bandung dan Harian Rakyat Maluku. Selain itu, organisasi yang pernah terlibat diantaranya adalah anggota Internasional Peneliti Ekonomi, Sosial, dan Teknologi (IPEST), anggota Forum Publikasi Ilmiah Indonesia, dan Asosiasi Pendidikan Masyarakat Indonesia. Penghargaan yang telah diraih sebagai 3 besar best paper Lomba Karya Tulis Ilmiah “Refleksi Inovasi dan Kolaborasi Jabar Juara” yang diselenggarakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2023.



Dr. Bakhtiar, S.Pd., SH., M.Pd., merupakan seorang dosen dan peneliti aktif pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar (UNM). Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di UNM pada tahun 1996, S2 di universitas yang sama pada tahun 2006 dengan konsentrasi Pendidikan Hukum dan Kewarganegaraan, dan meraih gelar Doktor dari Universitas Hasanuddin (UNHAS) pada tahun 2012 dalam bidang Ilmu Sosial dengan kajian khusus Kewarganegaraan. Sejak tahun 1996, beliau telah terlibat dalam berbagai proyek penelitian, baik yang bersumber dari dana mandiri maupun pendanaan PNPB. Topik penelitiannya mencakup isu-isu strategis seperti hak asasi manusia dalam perspektif Islam, perilaku politik etnis Tionghoa, efektivitas putusan pengadilan

tata usaha negara, pencegahan korupsi di lembaga legislatif, serta pengembangan model pendidikan karakter dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa penelitian lapangannya banyak dilakukan di wilayah Kabupaten Bone dan Kota Makassar, menunjukkan kontribusi nyata terhadap perkembangan sosial-hukum di tingkat lokal. Selain aktif meneliti, beliau juga mengabdikan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Pembina Golongan IV.a. Pengalaman dan dedikasinya dalam dunia akademik serta penelitian menjadikannya salah satu ahli di bidang pendidikan kewarganegaraan, hukum, dan ilmu sosial, khususnya dalam konteks pendidikan dan masyarakat di Indonesia Timur.



Munazar Umar, S.H., M.H. seorang akademisi dan dosen di bidang ilmu hukum yang saat ini mengabdikan diri sebagai tenaga pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Abdul Azis Kataloka Ambon. Dengan latar belakang pendidikan di bidang hukum, saya memiliki keahlian khusus dalam Hukum Pidana dan Hukum Bisnis. Perjalanan akademis saya dimulai ketika meraih gelar Sarjana

Hukum (S.H.) dari Universitas Satria Makassar pada tahun 2015, dengan fokus kajian pada Hukum Pidana. Keinginan untuk terus memperdalam ilmu hukum membawa saya melanjutkan pendidikan ke jenjang Magister Hukum (M.H.) di Universitas Islam Jakarta, di mana saya mendalami bidang Hukum Bisnis dan menyelesaikan studi pada tahun 2018. Sebagai seorang pendidik, saya berkomitmen untuk mengembangkan pemahaman hukum di kalangan mahasiswa dan masyarakat, khususnya dalam konteks dinamika hukum pidana dan perkembangan hukum bisnis di Indonesia. Melalui pengalaman akademis dan praktis yang saya miliki, saya aktif berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan melalui pengajaran, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.



Dr. Ricky Santoso Muharam, S.Pd., M.Sos., pria kelahiran Bekasi, 27 September 1986, lulus dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan mengambil prodi Pendidikan Kewarganegaraan (S1), kemudian melanjutkan program magister di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada prodi Hukum Islam, Konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan Islam. Dan menyelesaikan Program Doktor Ilmu Sosial Konsentrasi Ilmu Politik, Universitas Diponegoro (2025). Saat ini tercatat sebagai dosen tetap di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta (STIPRAM) untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila. Selain itu, aktif menulis di beberapa jurnal Nasional. Untuk berkomunikasi dengan penulis dapat melalui email penulis ricky@stipram.ac.id



Dra. Sudaryatie, M.Si Penulis lahir di Yogyakarta, 15 Februari 1962 Pendidikan S1 ditempuh di prodi Manajemen UPN "Veteran" Yogyakarta tahun 1981-1997, serta S2 di Pengkajian Ketahanan Nasional UGM pada tahun 1998-2002. Penulis alumni Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANNAS) tahun 1997. Anggota Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (AP3KNI). Satker Penulis di Prodi Manajemen FEB UPN "Veteran" Yogyakarta. Untuk berkomunikasi dengan penulis dapat melalui email sudaryati@upnyk.ac.id



Rina Patriana Chairiyani, SS, M.Pd adalah seorang ibu dan akademisi yang telah berkarier di dunia pendidikan kurang lebih 28 tahun lamanya. Penulis menempuh pendidikan diploma tiga, jurusan Bahasa Jepang di Fakultas Sastra, Universitas Padjadjaran Bandung. Di universitas yang sama, penulis juga menempuh pendidikan stratra satu di jurusan Sejarah Indonesia. Studi pendidikan S2 nya ditempuh di Prodi Pendidikan Bahasa di Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta. Untuk menuntaskan pendidikannya penulis mengambil pendidikan doktoral di Prodi Pendidikan Umum dan Karakter, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. Di waktu luangnya, penulis menghabiskan waktu bersama keluarga, teman dan kucing-kucingnya, membaca buku serta travelling ke berbagai tempat di Indonesia. Kecintaan penulis terhadap Indonesia, membuat penulis tergerak untuk bergabung pada penulisan materi ajar ini.



Dr. Muh. Sudirman, S.Ag., M.Pd. lahir di Sungai Batang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, pada 31 Desember 1971. Beliau merupakan dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar (UNM), yang aktif mengembangkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya dalam bidang hukum Islam dan kewarganegaraan. Pendidikan dasarnya ditempuh di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Falah Parit Cahaya (1984), dilanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah As'adiyah (1987), serta Madrasah Aliyah As'adiyah Sengkang (1990). Selanjutnya, beliau menyelesaikan pendidikan sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin Ujungpandang (1996), meraih gelar Magister pada Program Studi Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Makassar (2005), dan menyelesaikan Program Doktor pada bidang Syari'ah dan Hukum Islam di UIN Alauddin Makassar. Sebagai akademisi, Dr. Muh. Sudirman memiliki perhatian besar terhadap pengembangan kajian hukum Islam, terutama hukum

keluarga Islam, hukum adat, hukum kewarisan, serta relasi antara Islam dan budaya lokal. Berbagai hasil penelitian dan pemikirannya telah dipublikasikan dalam bentuk buku maupun karya ilmiah yang menjadi rujukan di bidangnya. Beberapa karya yang telah diterbitkan antara lain *Islam dan Budaya Lokal* (2011), *Hukum Adat* (2019), *Hukum Kewarisan* (2019), *Perkawinan Bugis* (2025), *Filsafat Pancasila: Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi dalam Kehidupan Masyarakat* (2026), serta *Gender dan Hukum Keluarga Islam* (2026). Melalui karya-karya tersebut, beliau secara konsisten mengintegrasikan perspektif normatif hukum Islam dengan realitas sosial dan budaya masyarakat Indonesia, sehingga memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan praktik hukum yang kontekstual.



REVITALISASI PANCASILA DEMOKRASI DAN HAM

Buku ini hadir sebagai upaya memperkuat kembali pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila, prinsip demokrasi, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketiganya merupakan fondasi penting dalam membangun kehidupan nasional yang adil, beradab, demokratis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Buku ini membahas Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, perkembangan demokrasi di Indonesia, serta konsep dan prinsip hak asasi manusia. Pembahasan juga menguraikan hubungan antara Pancasila, demokrasi, dan HAM dalam membentuk tata kehidupan yang menjunjung persamaan, kebebasan, keadilan, musyawarah, serta penghormatan terhadap martabat manusia.

Melalui pendekatan yang kontekstual, buku ini mengajak pembaca memahami pentingnya revitalisasi nilai-nilai tersebut di tengah perubahan sosial, perkembangan teknologi digital, dinamika politik, dan tantangan kehidupan kebangsaan. Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, maupun masyarakat umum dalam memperkuat kesadaran kebangsaan dan membangun budaya demokrasi yang berlandaskan Pancasila serta menghormati hak asasi manusia.

 www.penerbitwidina.com

 @penerbitwidina

 penerbit widina

 penerbitwidina@gmail.com

 widina store

 widina bookstore

Layanan Pencetakan & Penjualan Buku

 0815-7000-699



SCANME

Pendidikan & Metodologi Penelitian

ISBN 978-634-317-326-7



9

786343

173267